



Epilog Jangan Sekedar Retorika Politik Belaka

Era global menuntut adanya kemampuan bersaing yang handal. Banyak kekhawatiran yang muncul terhadap kesiapan Indonesia menghadapinya. Dunia usaha Indonesia ternyata sangat kropos sehingga tidak mampu menghadapi situasi bisnis semacam itu. Prediket jago kandang yang disandang pelaku bisnis Indonesia terjadi karena selama ini posisi pemerintah yang begitu dominan.

Pengalaman menunjukkan bahwa pemerintah yang dominan sebagai regulator dalam kegiatan ekonomi masyarakat telah menjurus pada suatu sistem perekonomian yang serba berperaturan. Akibatnya, timbul distorsi dan inefisiensi kegiatan ekonomi yang pada akhirnya menciptakan ketergantungan dunia usaha kepada proteksi dan fasilitas pemerintah.

Dunia usaha menjadi manja dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



kurang siap untuk bertarung dalam percaturan Internasional. Justru yang muncul adalah hegemoni ekonomi dari jumlah konglomerat yang berkolusi dengan aparat birokrasi. Keadaan ini pada akhirnya ternyata sangat menghambat munculnya kreativitas masyarakat. Para konglomerat, yang tergolong masyarakat kelas atas tidak kreatif karena dengan kolusi mereka telah memperoleh rente yang besar. Rakyat kebanyakan yang berada pada lapis bawah tidak tumbuh bakarnya, karena sengaja disumbat oleh kaum birokrat yang kolusif. Aparat sendiri mereka kreatif untuk semakin memperkuat dominasi kekuasaannya.

Setelah dilanda badai krisis, kesadaran atas kesalahan tersebut muncul. Meskipun hanya sebatas retorika belaka, tetapi hawa reformasi telah memunculkan hal-hal yang selama ini dianggap tabu untuk diseruakkan ke tengah-tengah masyarakat. Keinginan untuk mengubah orientasi pembangunan dari pertumbuhan ke arah pemberdayaan rakyat melalui pemerataan membuktikan bahwa selama ini telah terjadi salah kaprah dalam manajemen pembangunan Indonesia.

Dalam pendekatan ekonomi pembangunan, sebenarnya telah diperkenalkan suatu konsep, apa yang disebut dengan *Directly Unproductive Profit seek-*

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.



ing activities (DUP's). Dalam konsep ini berbagai kegiatan bisnis yang bertujuan komersial melalui cara-cara yang secara langsung tidak produktif mengingat kegiatan ekonomi seperti itu memang tidak ada hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat. Artinya keberadaan institusi bisnis tidak mendukung tujuan peningkatan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai contoh konkritnya di Indonesia adalah berbagai institusi yang pernah terkait dengan tata niaga Cengkeh dan tata niaga Jeruk di Kalimantan, tata niaga Caram di Sumatera. termasuk pula dunia perbankan dengan segala tingkah lakunya. Anehnya, konsep tersebut tetap saja makin subur dan ini merupakan tantangan yang sangat keras untuk mewujudkan perekonomian rakyat.

Pemberdayaan ekonomi rakyat dengan mengedepankan konsep ekonomi rakyat akan mendapat tantangan dari keberadaan pelaku bisnis yang selama ini mendapat lisensi dari pemerintah. Sementara keberadaan pemerintah yang berlebihan pada suatu kelompok masyarakat justru bertentangan dengan azas kebebasan berusaha. Dalam kondisi empiris (Ginanjar Kartasasmita, 1996) pemberdayaan masyarakat dan pemihakan kepada yang lemah dan kurang mampu harus dipahami sebagai upaya mencegah keadaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



persaingan yang tidak seimbang, tetapi bukan berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi dan pemberdayaan masyarakat. Iklim yang sehat perlu diciptakan untuk memungkinkan berkembangnya usaha masyarakat.

Agar ekonomi rakyat tidak menjadi sekedar mimpi dan bermanfaat pada masa "retorika" belaka, maka dibutuhkan kesungguhan untuk menempatkan rakyat pada posisi yang strategis. Bukan sebagai objek pembangunan belaka, yang justru kadang malah makin menyengsarakan mereka. Strateginya berpusat pada upaya mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat secara cepat untuk memperkuat kedudukan dan peranan rakyat dalam setiap struktur perekonomian. Perubahan struktural ini (Gunawan S, 1999) akan merupakan proses perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi yang tangguh, dari ekonomi sub-sistem ke ekonomi dasar, dan dari ketergantungan ke kemandirian.

Community Based Economy memang hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dalam mengantisipasi liberalisasi mendatang. Upaya nyata yang dilakukan pemerintah harus berpijak pada beberapa prinsip dasar, yakni memperbesar akses ekonomi



masyarakat, mendorong efisiensi dalam suasana kompetisi, dan merealisasi otonomi daerah secepat mungkin.

Akses ekonomi dikembangkan dengan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memasuki pasar (*market entry*) dan memiliki sumber-sumber ekonomi secara bertanggung jawab. Khusus bagi pengusaha kecil dan menengah, perlu kiranya diberikan kesempatan berusaha pada kondisi yang terlepas dari monopoli dan lisensi yang tidak memihak mereka. Efisiensi didorong melalui munculnya kompetitor dalam usaha yang sehat. Sedangkan pengembangan otonomi dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan yang dimulai dari keberadaan masyarakat tempatan.

Beberapa langkah, khususnya di daerah Riau, perlu dilakukan. Pertama, pemetaan wilayah berdasarkan potensi yang dimilikinya. Termasuk wilayah yang akan dijadikan basis pertumbuhan di setiap kabupaten. Kedua, pembangunan infrastruktur untuk mengoptimalkan pembukaan isolasi masyarakat, khususnya kepada sentra-sentra produksi ke pasarnya.

Ketiga, mengembangkan keterkaitan fungsional dan mutualisme antara masyarakat dengan industri. Sangat



dituntut tanggung jawab perusahaan-perusahaan berskala besar untuk tidak saja memelihara fasilitas masyarakat yang ada, tetapi juga mengkaitkan usahanya dengan pengembangan usaha masyarakat. *Keempat*, pengembangan lembaga ekonomi masyarakat lapis bawah dengan menempatkan mereka sebagai basis pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, *SDM* ditingkat ini harus dimutuskan sesuai dengan arah pengembangan usahanya. *Kelima*, menumbuhkan lembaga pemberdayaan masyarakat desa dalam bentuk *Bank Desa*. *Keenam*, penataan ulang kepemilikan tanah dan peruntukkannya diarahkan pada diversifikasi komoditas unggulan daerah. *Ketujuh*, mengembangkan prakarsa partisipasi masyarakat melalui pemberian wewenang yang lebih besar dalam menentukan objek pembangunan dan mengelolanya. *Partisipatory development strategy* seperti harus dapat diuji lewat pengembangan kelompok usaha bersama (KUB) yang ditumbuhkan oleh masyarakat. Legitimasi birokrasi yang selama ini dominan harus diubah fungsi menjadi katalisator yang mampu menjembatani berbagai kepentingan masyarakat, agar pemberdayaan ekonomi rakyat tidak sekedar "retorika" belaka. @

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.
- b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan Universitas Riau.